

DAFTAR REFERENSI

A. Buku

- M. Friedman Lawrence, 2013. Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Bandung: Nusamedia.
- Syafiie Inu Kencana, 2010. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Refika Aditama.
- G. Setya Nugraha, R. Maulina F. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Surabaya: Hal.145
- Sf. Marbun. 1997. Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administrasi Di Indonesia. Liberty, Yogyakarta.
- Rusadi Kantaprawira, 1988 Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar Bandung: Sinar Baru.
- Winardi, 1989. Pengantar Tentang Teori Sistem dan Analisa Sistem Bandung : Mandar Maju.
- Bachsan Mustafa, 1984. Sistem Hukum Indonesia Bandung: Remadja Karya.
- Sjachran Basah, 1986. Tiga Tulisan Tentang Hukum. Bandung : Armico. Menurutnya arti *communis opinio doctorum* adalah suatu rumusan yang dapat diterima secara umum. Sedangkan pengertian *communis opinio* itu sendiri berarti pendapat umum, lihat I.P.M. Ranuhandoko B.A., Terminologi Hukum Inggris-Indonesia (Jakarta : Sinar Grafika 2003) hlm. 146.
- L.J. Van Apeldoorn, 1962. Pengantar Ilmu Hukum Djakarta : Noor Komala
- Saifullah, 2010. Refkesi Sosiologi Hukum, Bandung: Refika Aditama.
- Farida Indrati S Maria, 2007. Ilmu Perundang-Undangan Cet. Ke-7. Yogyakarta: Kanisius.
- Prof. H. Rozali Abdullah, S. H. 2005. Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Cet. Ke-1. Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada.
- Rahardjo Adisasmita, 2011. Manajemen Pemerintah Daerah, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Satjipto Rahardjo, 1983, Masalah Penegakan Hukum, Bandung: Sinar Baru.
- Usman Nurdin, 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Mukti fajar dan Yulianto Achmad, 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Amiruddin, Zainal Asikin, Cet-I, 2004 Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Soekanto Soerjono, 2008. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. PT. Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang No 36 Tahun 2019 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang

Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Dan Menteri Dalam Negeri No 188/Menkes/Pb/2011 Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok

Perturan Daerah No 3 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Peraturan Walikota Tanjungpinang No. 2 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No. 3 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan.

C. Jurnal

Media Of Law And Sharia. Implementasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Volume 2, Nomor 1, 2020. Hal. 173

Rin Agustina A'yuni Nasrullah, Implementasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Media Of Law And Sharia, Vol. 2, No. 1, 2020, 172-189

Rin Agustina, Implementasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Media Of Law And Sharia, Vol. 2. No. 1, 2020

Azka, Muhammad. 2020. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus Di Stie Putra Bangsa Kebumen). Universitas Negeri Semarang. Hal 10.

Muhammad Hilmi Akhsin. Anis Mashdurohatun. 2017. Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Menurut Uu No. 42 Tahun 1999, Jurnal Akta, Volume.4 Nomor. 3

D. Internet

Komisi Nasional Pengendalian Tembakau, “Wilayah Kawasan Tanpa Rokok”, [Http://komnaspt.or.id/kawasan-tanpa-rokok/](http://komnaspt.or.id/kawasan-tanpa-rokok/), Diakses Pada Tanggal 22 Maret 2022, Pukul 19.00 Wib.

Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang Dalam Kaca Mata 2021

